

ABSTRAK

Latar Belakang: Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen merupakan bentuk apresiasi dalam kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Puskesmas selaku fasilitas kesehatan tingkat pertama. BPJS Kesehatan membayarkan besaran kapitasi per bulan pada Puskesmas yang terdaftar sebagai mitra, sehingga setiap FKTP akan menerima jumlah kapitasi yang berbeda-beda akan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional Puskesmas. Salah satu indikator besaran penerimaan dana kapitasi di Puskesmas adalah indikator angka kontak yang mempengaruhi besaran anggaran kapitasi yang diterima oleh Puskesmas.

Tujuan: mengidentifikasi kepatuhan implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan untuk memenuhi target angka kontak di Puskesmas kabupaten Banyumas.

Metode: Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus, dengan strategi riset implementasi. Penentuan subyek penelitian dengan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan; data sekunder meliputi data capaian angka kontak di puskesmas dan data primer melalui wawancara mendalam.

Hasil : (1) Kepatuhan dalam implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan untuk memenuhi target angka kontak di kabupaten Banyumas belum terpenuhi secara optimal baik cakupan, jumlah, maupun waktu sesuai dengan SOP yang ada. (2) Setiap puskesmas telah menjalankan strateginya untuk mencapai angka kontak melalui kegiatan sesuai dengan Perber Sekjen Kemenkes RI dan Dirut BPJS No. Hk.01.08/III/980/2017 dan No. 2 Tahun 2017 (3) Kualitas pelayanan di Puskesmas belum sepenuhnya dikatakan baik, meskipun semua sudah berkomitmen baik dan sesuai dengan aturan tetapi ada Puskesmas yang merasa bahwa tidak berartinya efek atau hukuman akibat dari tidak tercapainya target indikator KBK (dana kapitasi turun). Fasilitas dapat dikatakan baik dan sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan di puskesmas. (4) Hambatan yang ada di Puskesmas antara lain; beban kerja petugas puskesmas yang tinggi, petugas entri data yang kurang terampil, jaringan internet yang lambat, adanya peserta yang tidak terdaftar atau kartu BPJS tidak aktif, adanya selisih antara data yang di entri oleh petugas Puskesmas dengan data hasil validasi oleh BPJS.

Kesimpulan: Belum semua komponen dalam implementasi kebijakan kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan untuk memenuhi target angka kontak di kabupaten Banyumas dipatuhi dengan baik oleh tenaga kesehatan. Perlu perhatian yang lebih dari pemerintah setempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya petugas yang berkaitan dengan capaian angka kontak di puskesmas dan penguatan sistem dan jaringan internet di puskesmas terkait sistem online di puskesmas.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kapitasi, Angka Kontak

ABSTRACT

Background: Capitation Based on Fulfillment of Commitment is a form of appreciation in collaboration between BPJS Kesehatan and Puskesmas as a first-rate health facility. BPJS Kesehatan pays the amount of capitation per month at the Puskesmas registered as partners, so that each FKTP will receive a different number of capitation will be used for payment of health services and support for operational costs in meeting the needs of participants and supporting the implementation of the JKN program.

Purpose: Identify compliance with the implementation of capitation-based policy fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in the Banyumas district health center.

Method: Qualitative research uses a case study approach, with an implementation research strategy. Determination of research subjects using purposive sampling technique. Data collection was done by collecting secondary data including data on the achievement of contact numbers in the health center and primary data through in-depth interviews.

Result: (1) Fidelity in implementation of capitation-based policies to fulfill service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas has not been fulfilled optimally in terms of coverage, frequency and time in accordance with existing SOP. (2) The strategy for implementing policies through meetings, the implementation of prolanis every month through cadres, visits by midwives to patients of pregnant women or patients of postpartum who have BPJS. (3) The service quality of officers from each puskesmas is not fully said to be good. (4) Obstacles experienced in the form of complaints about HR who lack skilled procedures in mengentri with a slow online system.

Conclusion: The implementation of capitation policies based on fulfillment of service commitments to meet the target number of contacts in Banyumas Regency was adhered to and implemented by health workers, especially officers related to the achievement of contact numbers in puskesmas and improving the quality of internet networks in health centers related to online systems in puskesmas.

Keywords: Policy Implementation, Capitation, Service Commitment, Contact Numbers